

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI**

**ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING FINANCIAL
REPORT QUALITY OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND
PUBLIC HOUSING WITH INFORMATION TECHNOLOGY
UTILIZATION AS MODERATION VARIABLE**

RIENI KARINA

A062212044



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

TESIS

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI**

**ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING FINANCIAL
REPORT QUALITY OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND
PUBLIC HOUSING WITH INFORMATION TECHNOLOGY
UTILIZATION AS MODERATION VARIABLE**

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh:

RIENI KARINA

A062212044



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI

Disusun dan diajukan oleh

**RIENI KARINA
A062212044**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 10 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nirwana, SE., Ak., M.Si.,CA.
NIP. 196511271991032001



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si.,CA.
NIP. 196811251994122002

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si.,CA.
NIP. 196811251994122002



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rieni Karina
NIM : A062212044
Jurusan/Program Studi : Magister Akuntansi
Jenjang : S2

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,



RIENI KARINA

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;

Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA. selaku Ketua program studi Pascasarjana Akuntansi sekaligus sebagai dosen pembimbing pendamping yang selalu menyediakan waktunya kapanpun untuk memberikan arahan, membantu peneliti dari awal hingga akhir dan mendengarkan curhatan penulis;

Ibu Dr. Nirwana, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku pembimbing utama yang sangat baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan lancar;

Para penguji Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA, Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak., ACPA dan Ibu Dr. Sri Sundari SE., Ak., M.Si, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga pada saat seminar proposal dan seminar hasil tesis hingga siding tutup;

BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan;

Suami tercinta Pungky Setyo Wibowo yang telah memberikan restu dan izin agar penulis bisa melanjutkan pendidikan, selalu mendukung dan mendampingi penulis atas kendala-kendala yang dihadapi selama ini;

Anaku tersayang Carissa Almeera Husna yang selalu menceriakan hari-hari mami dalam menjalani hidup ini;

Untuk mama, papa dan keluarga besar penulis yang selalu mendoakan tiada henti dan memberikan semangat;

Seluruh rekan-rekan angkatan 1 Program Magister Super Spesialis kerjasama Kementerian PUPR dan Universitas Hasanuddin atas dukungan dan pembelajaran hidup;

Teriring doa penulis panjatkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis semoga diberikan kesehatan, kehidupan yang barokah serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Makassar, Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

RIENI KARINA. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi* (dibimbing oleh Nirwana dan Aini Indrijawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pemoderasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan di Kementerian PUPR sebanyak 89 unit kerja dengan pemilihan sampel secara *purposive sampling*. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode survei. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis regresi moderat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini terlihat dari tingkat signifikansi masing-masing variabel pada uji t analisis regresi linier berganda tanpa moderasi adalah kurang dari 5% dan (2) pemanfaatan teknologi informasi yang terdiri atas perangkat, pengelolaan data keuangan, dan pemeliharaan dapat memoderasi secara positif interaksi variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, interaksi komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Akan tetapi, interaksi kompetensi sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat memoderasi dan berpengaruh secara negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi informasi, tidak dapat memoderasi interaksi sistem pengendalian internal dan interaksi gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada uji t analisis regresi moderat (MRA).

Kata kunci: kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan



ABSTRACT

RIENI KARINA. *Analysis of Factors Influencing Financial Report Quality of the Ministry of Public Works and Public Housing with Information Technology Utilization as Moderating Variable* (supervised by Nirwana and Aini Indrijawati)

The research aims to examine and analyse the effect of applying government accounting standard, human resource competency, internal control system, organizational commitment, and leadership style on the financial report quality by using information technology as the moderating variable in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). A total of 178 respondents participated in the research conducted in the Ministry of PUPR with the samples of 89 work units using the purposive sampling technique. Questionnaires were used to collect the primary data with the survey method. The data analysis methods used were the multiple regression analysis and moderate regression analysis. The research findings indicate that first, the application of government accounting standard, human resource competency, internal control system, organizational commitment, and leadership style have the positive and significant effect on the financial report quality. This can be seen from the significance level of each variable in the t-test of the multiple linear regression analysis without the moderation, which is less than 5%. Second, the information technology use comprising the tools, financial data management, and maintenance can positively moderate the interaction of the variables in the application of government accounting standard and the interaction between the organizational commitment and the financial report quality in the Ministry of Public Works and Public Housing. However, the interaction between human resource competency and the information technology use can moderate or negatively affect the quality of financial report. While, the information technology use cannot moderate the interaction of the internal control system and the interaction of leadership style on the financial report quality in the Ministry of Public Works and Public Housing based on the t-test of moderate regression analysis (MRA).

Key words: financial report quality, information technology utilisation, application of government accounting standard; human resource competency, internal control system, organizational commitment, leadership style



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1. Manfaat teoritis.....	12
1.4.2. Manfaat praktis.....	13
1.4.3. Ruang lingkup penelitian.....	14
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep.....	16
2.1.1. Teori stewardship.....	16
2.1.2. Teori kontingensi.....	18
2.1.3. Kualitas laporan keuangan	19
2.1.4. Penerapan standar akuntansi pemerintah	22
2.1.5. Kompetensi sumber daya manusia	23
2.1.6. Sistem pengendalian internal	25
2.1.7. Komitmen organisasi	26
2.1.8. Gaya kepemimpinan	28
2.1.9. Pemanfaatan teknologi informasi	29
2.2. Telaah Riset Terdahulu	31
BAB III RERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	37
3.1. Rerangka Konseptual.....	37
3.2. Hipotesis Penelitian.....	40
3.2.1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	41
3.2.2. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	42

3.2.3.	Sistem pengendalian internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	43
3.2.4.	Komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	45
3.2.5.	Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	46
3.2.6.	Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	48
3.2.7.	Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	49
3.2.8.	Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi sistem pengendalian internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	51
3.2.9.	Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	53
3.2.10.	Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	55
BAB IV METODE PENELITIAN		57
4.1.	Jenis Penelitian	57
4.2.	Populasi dan Sampel	57
4.2.1.	Populasi	57
4.2.2.	Sampel	58
4.3.	Jenis dan Sumber Data	59
4.3.1.	Data primer	59
4.3.2.	Data sekunder	59
4.4.	Metode Pengumpulan Data	59
4.5.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	61
4.6.	Metode Analisis Data	64
4.6.1.	Statistik deskriptif	65
4.6.2.	Uji kualitas data	66
4.6.3.	Uji asumsi klasik	66
4.6.4.	Uji Kebaikan Model	68
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		70
5.1.	Tingkat Pengembalian Kuesioner	70
5.2.	Analisa Deskripsi Responden	70
5.2.1.	Jenis kelamin	71
5.2.2.	Pendidikan terakhir	71
5.2.3.	Jabatan	72
5.2.4.	Masa kerja	73

5.3.	Analisa Statistik Deskripsi Variabel Penelitian	73
5.3.1.	Variabel kualitas laporan keuangan (Y).....	76
5.3.2.	Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1)	77
5.3.3.	Variabel kompetensi sumber daya manusia (X_2)	79
5.3.4.	Variabel sistem pengendalian internal (X_3)	80
5.3.5.	Variabel komitmen organisasi (X_4)	81
5.3.6.	Variabel gaya kepemimpinan (X_5)	82
5.3.7.	Variabel penerapan teknologi informasi (Z)	83
5.4.	Uji Kualitas Data	83
5.4.1.	Uji validitas	83
5.4.2.	Uji reliabilitas	89
5.5.	Uji Asumsi Klasik	89
5.5.1.	Uji normalitas.....	89
5.5.2.	Uji multikolonieritas	91
5.5.3.	Uji heteroskedastisitas	91
5.6.	Analisis Regresi Linier Berganda dan Pengujian Hipotesis	92
5.6.1.	Uji simultan (uji F)	94
5.6.2.	Uji determinasi (R^2)	95
5.6.3.	Uji signifikansi parsial (Uji t)	96
5.7.	Analisis Regresi Moderat (MRA) dan Pengujian Hipotesis	98
5.7.1.	Uji simultan (uji F)	102
5.7.2.	Uji determinasi (R^2)	103
5.7.3.	Uji signifikansi parsial (uji t).....	104
5.8.	Pembahasan Hasil Penelitian	107
5.8.1.	Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.	107
5.8.2.	Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan	109
5.8.3.	Pengaruh sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan	111
5.8.4.	Pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan	113
5.8.5.	Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan	115
5.8.6.	Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan	117
5.8.7.	Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan.....	118

5.8.8. Pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi sistem pengendalian internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan.....	119
5.8.9. Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan	120
5.8.10. Pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan	121
BAB VI PENUTUP	123
6.1. Kesimpulan	123
6.2. Implikasi Penelitian.....	124
6.3. Keterbatasan Penelitian	124
6.4. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN tahun 2015 – 2021.....	3
Tabel 1.2. Perkembangan laporan hasil Kementerian PUPR.....	4
Tabel 4.1. Teknik Pengambilan Sampling.....	58
Tabel 4.2. Definisi operasional variabel.....	62
Tabel 5.1. Distribusi kuesioner	70
Tabel 5.2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	71
Tabel 5.3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir	71
Tabel 5.4. Karakteristik responden berdasarkan jabatan	72
Tabel 5.5. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja.....	73
Tabel 5.6. Statistik deskriptif variabel penelitian	74
Tabel 5.7. Hasil statistik deskriptif variabel kualitas laporan keuangan (Y).....	77
Tabel 5.8. Hasil statistik deskriptif variabel penerapan SAP (X_1)	78
Tabel 5.9. Hasil statistik deskriptif variabel kompetensi SDM (X_1)	79
Tabel 5.10. Hasil statistik deskriptif variabel SPI (X_3)	80
Tabel 5.11. Hasil statistik deskriptif variabel komitmen organisasi (X_4).....	81
Tabel 5.12. Hasil statistik deskriptif variabel gaya kepemimpinan (X_5)	82
Tabel 5.13. Hasil statistik deskriptif variabel pemanfaatan teknologi informasi (Z)	83
Tabel 5.14. Uji validitas variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_1)	84
Tabel 5.15. Uji validitas variabel kompetensi sumber daya manusia (X_2).....	85
Tabel 5.16. Uji validitas variabel sistem pengendalian internal (X_3).....	86
Tabel 5.17. Uji validitas variabel komitmen organisasi (X_4)	86
Tabel 5.18. Uji validitas variabel gaya kepemimpinan (X_5).....	87
Tabel 5.19. Uji validitas variabel pemanfaatan teknologi informasi (Z)	88
Tabel 5.20. Uji validitas kualitas laporan keuangan (Y)	88
Tabel 5.21 Uji reliability statistics.....	89
Tabel 5.22. Hasil Uji normalitas pada residual	90
Tabel 5.23. Uji multikolonieritas	91
Tabel 5.24 Uji Glejser	92
Tabel 5.25. Uji analisis regresi linier berganda tanpa moderasi.....	93
Tabel 5.26. Hasil ANOVA regresi linier berganda (uji f).....	95
Tabel 5.27. Hasil koefisien determinasi model <i>summary</i>	95
Tabel 5.28 Uji Analisis regresi moderat (MRA)	99
Tabel 5.29. Hasil ANOVA regresi moderat (uji f)	102
Tabel 5.30. Hasil koefisien determinasi model <i>summary</i>	103
Tabel 5.31. Tabel Hasil Penelitian	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rerangka konseptual.....	40
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Satuan Kerja.....	133
Lampiran 2 Kuesioner	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan di dalam UUD 1945 untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan negara. Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah pusat berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah representasi sistematis dari posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 Tahun 2015).

Kualitas pelaporan keuangan mencerminkan kecukupan informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi menunjukkan bahwa informasi yang terkandung dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Firmansyah *et al.*, 2022). Mempertahankan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Sangat penting bahwa semua perusahaan di sektor swasta dan publik mempertahankan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam hal pelaporan keuangan. (www.bpk.go.id)

Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memiliki karakteristik kualitatif. Hal ini sesuai dengan *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 2 berisi tentang karakteristik-karakteristik kualitatif informasi keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan berguna dalam meyakinkan bahwa informasi keuangan adalah bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi (FASB 1980). Diperlukan atribut atau kualitas bahwa informasi keuangan seharusnya memiliki karakteristik kualitatif utama yaitu relevan dan reliabel. Materialitas terkait dalam kualitas relevan. Karakteristik kedua mencakup komparabilitas, konsistensi dan ketepatan-waktuan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan ukuran normatif yang diperlukan untuk mewujudkan dan memenuhi tujuan tersebut, termasuk relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas sangat penting karena informasi yang terkandung dalam laporan harus relevan, dan jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka informasi tersebut tidak dapat digunakan atau dipercayai oleh pengguna informasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nagara & Mulyani, 2019).

Kualitas laporan keuangan negara terkait erat dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit pemerintah pusat. Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dibutuhkan oleh pemerintah sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan APBN, dasar pengambilan kebijakan, komunikasi capaian pembangunan kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, dan komitmen pemerintah untuk menerapkan *good governance*.

Sejak standar akuntansi keuangan pemerintah berbasis akrual berlaku di tahun 2015, perkembangan selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun

2021 menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (BPK RI, 2022). Di satu sisi, terdapat pencapaian peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat di mana laporan keuangan pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK sebanyak 65% di tahun 2015 dan meningkat menjadi 95% di tahun 2021 (BPK RI, 2022). Di sisi lain, masih terdapat pemerintah pusat yang belum memperoleh opini tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua laporan keuangan saat ini ditampilkan dengan benar. Adanya laporan keuangan pemerintah yang memiliki opini selain wajar tanpa pengecualian terjadi akibat ketidaksesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau ketidakcukupan bukti untuk mendukung kewajaran laporan keuangan pemerintah pusat (Firmansyah *et al.*, 2022).

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Pada Tahun 2021, entitas pemeriksaan BPK mencakup 87 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan satu Bendahara Umum Negara (BUN). Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2015 - 2021 disajikan pada table 1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN tahun 2015 – 2021

Opini	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	56	74	80	82	85	85	84
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	26	8	6	4	2	2	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	4	6	2	1	1	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	86	88	88	87	88	87	88

Sumber : www.bpk.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memperoleh Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyusunan Laporan Keuangan (LK) merupakan kewajiban bagi seluruh unit pengguna anggaran. Tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai pengungkapan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan inilah yang menjadi bahan audit oleh BPK. Menurut Menteri Basuki, dengan melihat capaian Kementerian PUPR pada LK Tahun 2021, Kementerian PUPR akan terus berupaya meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 1.2. Perkembangan laporan hasil Kementerian PUPR

BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Olahan data peneliti

Berdasarkan Tabel 1.2. Pada Tahun 2015 Kementerian PUPR mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK hal ini dipengaruhi adanya perubahan Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru hasil gabungan KL likuidasi mulai Tahun 2015. Dalam laporan keuangan semester pertama dan kedua tahun 2018 Kementerian PUPR hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Sebanyak 33 temuan masuk dalam laporan keuangan BPK 2018. Namun, ada 5 (lima) temuan utama yang menyebabkan

Kementerian PUPR tidak mendapatkan WTP. Temuan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengelolaan anggaran.

Anggota IV BPK RI Haerul Saleh menyatakan Opini atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu tidak menjamin bahwa *fraud* tidak akan terjadi atau kemungkinan terjadinya *fraud* tidak akan terjadi di kemudian hari. Opini kewajaran laporan keuangan didasarkan pada kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, ketepatan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahmawati *et al.*, 2018) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern menunjukkan hasil yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sorousai (2019) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Bagaimana Kementerian PUPR sebagai salah satu organisasi sektor publik meraih, mempertahankan opini WTP dan semakin meningkatkan kualitas atas laporan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan telah dilakukan, di antaranya dilakukan oleh (Agung & Gayatri, 2018) penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Penelitian yang dilakukan oleh (Evicahyani & Setiawina, 2016) juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui variabel intervening, yaitu Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kualitas pelaporan keuangan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya penerapan sistem informasi akuntansi keuangan, pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan lemahnya peran audit internal (Setyowati *et al.*, 2016). (Yuliani & Agustini, 2016) dalam penelitiannya menyatakan rendahnya kompetensi sumber daya manusia, belum maksimalnya penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan lemahnya pengendalian intern pada SKPD di Kabupaten Magelang yang melatarbelakangi buruknya kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Banyak temuan BPK atas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2012 yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan keuangan dibandingkan dengan laporan sebelumnya (Tribun Jogja, 27 Juli 2012).

Kualitas laporan keuangan memiliki keterkaitan dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban selama satu periode harus disusun dan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Lamonisi, 2016). Standar akuntansi

diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Rompas dan Kindangen, 2022).

Penelitian sebelumnya tentang pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan adanya perbedaan hasil, antara lain penelitian oleh (Lopa, 2023), (Yusriwati & Susanti, 2022), (Yusrianti *et al.*, 2021), (Nirwana & Haliah, 2018), (Rahmawati *et al.*, 2018), (Abjan dan Abubakar, 2018), (Evicahyani & Setiawina, 2016), (Juwita, 2013) yang menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan (Yuliani & Agustini, 2016), (Mahartini *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Selain pengaruh standar akuntansi pemerintahan hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah juga telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya antara lain oleh (Herlina, 2022), (Yusrianti *et al.*, 2021), (Angelina, 2021), (Pangalinan, 2020), (Gita Saraswati & Budiasih, 2019), (Jesica Prastiwi & Mimba, 2018), (Trisnawati & Wiratmaja, 2018), (Harlinda, 2016), (Untary & Ardiyanto, 2015), (Nurillah & Muid, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dimana semakin baik kualitas SDM maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. Begitupun dengan hasil penelitian terhadap sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan efisien sistem pengendalian intern maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah.

Terdapat juga penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Widyawati & Ismunawan, 2022), (Yuliani & Agustini, 2016), sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah (Yusriwati & Susanti, 2022); (Mahartini *et al.*, 2021), (Yuliani & Agustini, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya yang kurang memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas, sedangkan pada sistem pengendalian internal yang sudah ditetapkan belum diterapkan secara efektif sehingga informasi laporan keuangan yang dihasilkan tidak memberikan keyakinan yang memadai.

Penelitian terkait komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah telah dilakukan sebelumnya antara lain (Pangalinan, 2020), (Agung & Gayatri, 2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin tinggi komitmen organisasi, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. Berbeda dengan penelitian (Harlinda, 2016) yang menyatakan komitmen organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan terbatasnya kreativitas pegawai untuk secara aktif membentuk dan mengelola tanggung jawabnya sebagai pegawai pemerintah, terutama dalam menyusun laporan keuangan.

Sebagai wujud adanya komitmen organisasi yang baik tidak terlepas dari peran pimpinan suatu organisasi, terkait dengan gaya kepemimpinan, (Veliani, 2018) mengungkapkan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 17,3%. (Agung & Gayatri, 2018) mengungkapkan gaya

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Karangasem. Penelitian dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi pada peran auditor internal, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh (Salia & Wibowo, 2022). Studi tersebut menyimpulkan peran auditor internal dan kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan. Variabel gaya kepemimpinan hanya memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk mempekerjakan individu dengan gaya kepemimpinan tertentu yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Untuk mendukung lahirnya laporan keuangan yang berkualitas diperlukan dukungan teknologi informasi, dalam menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh (Angelina, 2021), (Wulan *et al.*, 2020), (Pangalinan, 2020), (Akhmad *et al.*, 2018); (Rahmawati *et al.*, 2018), (Agung & Gayatri, 2018), (Harlinda, 2016), penelitian tersebut mengungkapkan adanya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian (Widyawati & Ismunawan, 2022), (Qomah & Ismunawan, 2021), (Setyowati *et al.*, 2016) yang mengungkapkan tidak ada pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Gayatri (2018), dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada adanya variabel tambahan berupa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan menjadikan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variable moderasi. Sampel yang akan diteliti juga berbeda, dimana penelitian ini dilakukan pada pemerintah pusat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pada penelitian sebelumnya meneliti pemerintah daerah di Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan fenomena dan uraian penjelasan di atas, serta masih minimnya penelitian dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel pemoderasi dan masih minimnya penelitian di lingkungan pemerintah pusat merupakan ide yang mendasari penelitian ini yang berjudul:

“Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Pemoderasi ”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan?
7. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan?
8. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan?
9. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan?
10. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis :

1. Pengaruh variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pengaruh variabel sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Pengaruh variable komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.

5. Pengaruh variable gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan.
7. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam memoderasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan.
8. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam memoderasi sistem pengendalian internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan.
9. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam memoderasi komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.
10. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam memoderasi gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dalam menambah pemahaman tentang Akuntansi Sektor Publik dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian intern (SPI), komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan yang menjadi obyek kajian dalam penelitian diharapkan akan memperkaya keilmuan dalam akuntansi sektor publik di pemerintah pusat.

Kontribusi teori penelitian ini berfokus pada *stewardship theory* (Donaldson & Davis, 1991) sebagai grand theory, karena beberapa asumsi teori sesuai dengan tujuan penelitian, pertanyaan, dan hipotesis. Salah satu penerapan *stewardship theory* dalam kaitannya dengan masalah penelitian

adalah adanya hubungan yang kuat antara keberhasilan organisasi dan efisiensi ketika tata kelola diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi dan ilmu sosial. Eksekutif (pemerintah) sebagai *steward* (pelayan) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal (rakyat) akan mengerahkan diri semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi melalui kajian psikologi dan sosiologi, maka sangat relevan jika teori *stewardship* diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik khususnya pemerintahan.

Selain itu, penelitian ini mampu menjelaskan implikasi *Contingency theory* terhadap solusi ketidakkonsistenan hasil-hasil riset sebelumnya, dimana Pendekatan kontinjensi memberikan pandangan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dipengaruhi oleh variabel yang bersifat kondisional (Sorusai, 2019).

1.4.2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini, secara praktis dapat memberikan kontribusi bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan semakin meningkatkan kualitas atas Laporan Keuangan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki permasalahan dan meningkatkan kualitas kinerja laporan keuangan Pemerintah Pusat di Kementerian PUPR melalui peningkatan kualitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

1.4.3. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah 89 Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan masing-masing satker diwakili oleh 2 orang yang menangani pengelolaan keuangan APBN.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar informasi dapat disampaikan dengan urutan logis dan berdasarkan aturan. Sistematika penulisan disajikan sebagai berikut :

BAB I : pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI DAN KONSEP

Bab ini memuat uraian sistematik tentang teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III : RERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini juga menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

BAB IV : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran data dan hasil pengolahan data dalam bentuk tabel dan deskripsi hasil penelitian. Serta analisis terhadap hasil penelitian yang dikaitkan dengan hipotesis yang telah dibuat, kemudian dibandingkan dengan tujuan penelitian dan teori-teori pendukungnya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori *stewardship*

Teori ini dikemukakan oleh Edwin A. Locke pada tahun 1968 yang merupakan salah satu bentuk teori motivasi yang terkait dengan psikologi manusia yang menekankan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasar teori ini adalah individu yang memahami tujuan organisasi, maka pemahaman tersebut akan memengaruhi tindakannya dalam bekerja. Teori ini juga melihat tujuan dan niat (komitmen) sebagai mediator dari kinerja (Locke, E, 1968). Sehingga apabila individu memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan memengaruhi tindakannya dan berimplikasi pada kinerjanya. (Pasoloran & Rahman, 2001) menyimpulkan bahwa *stewardship theory* merupakan pandangan baru tentang pengelolaan suatu organisasi dan personel-personel yang terlibat didalamnya. Dalam pendekatan ini dikembangkan konsep kebersamaan, kemitraan, pemberdayaan, dan saling percaya dan melayani.

Menurut (Donaldson & Davis, 1991) dalam teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia menempatkan individu yang berintegritas. Pada penelitiannya (Raharjo, 2007) mengatakan teori *stewardship* adalah suatu model alternatif dari perilaku dan motivasi managerial, yang mana diperoleh dari tradisi

secara psikologis dan sosiologis. Dalam teori *stewardship*, manajer berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak selaras/sama, *steward* akan mencoba untuk bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih memperhatikan upaya pencapaian tujuan organisasi. (Jefir, 2018) mengatakan Sifat dasar manusia yang dapat dipercaya menjadi dasar terciptanya teori stewardship, dimana diharapkan manajemen yang menjadi pengelola perusahaan mendahulukan kepentingan perusahaan ataupun pemegang saham dari kepentingan pribadinya. Dan menganggap bahwa dengan mengutamakan kepentingan korporasi, maka kepentingan pribadi juga dapat terwujud.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah menuju *good governance* yang terdiri dari transparansi dan akuntabilitas, untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kemampuan dari aparatur negara yang ada. Penerapan teori stewardship ini mendukung terlaksananya reformasi birokrasi pada pemerintahan yang sedang dilaksanakan dimana dalam *grand design* nya memiliki tujuan akhir birokrasi yang bersih serta peningkatan pelayanan publik yang prima. Pencapaian reformasi birokrasi ini merupakan pelaksanaan *good governance* yang diharapkan dapat tercipta di setiap perusahaan ataupun organisasi yang memiliki ciri *going concern* (Jefir, 2018).

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini dapat menjelaskan eksistensi pemerintah pusat sebagai suatu lembaga yang dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu menyusun pertanggungjawaban keuangan yang handal dan

berkualitas yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan pembangunan dan ekonomi keuangan tercapai serta kesejahteraan rakyat tercapai secara maksimal.

2.1.2. Teori kontingensi

Teori kontingensi adalah teori organisasi yang menegaskan bahwa tidak ada cara terbaik untuk menjalankan bisnis perusahaan, untuk memimpin dan mengendalikan perusahaan, atau untuk mengambil keputusan. Sebaliknya, tindakan terbaik adalah kontingen (tergantung) pada keadaan internal dan eksternal. Seorang pemimpin kontingen (situasional) secara efektif menerapkan gaya kepemimpinannya mereka pada situasi yang tepat.

Menurut Stoner et al., (1996:47) pendekatan kontingensi, atau pendekatan situasional, adalah suatu pandangan bahwa teknik-teknik manajerial yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan organisasi dapat bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada rancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang dapat diterapkan secara efektif untuk semua kondisi organisasi, namun sebuah sistem pengendalian tentunya harus efektif untuk situasi tertentu suatu organisasi, perusahaan atau pemerintahan (Otley, 1980).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kontingensi sebagai teori pendukung (*supporting theory*). (Suarmika & Suputra, 2016) menyatakan bahwa pendekatan kontingensi dapat digunakan sebagai solusi atas ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya. Menurut Govindarajan (1986), diperlukan upaya untuk mengatasi ketidakkonsistenan tersebut dengan mengidentifikasi faktor-faktor potensial antara kedua variabel dengan menggunakan pendekatan kontingensi. Hasil dari penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan hasil antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, sehingga

disimpulkan terdapat variabel lain yang memengaruhinya. Tujuan penggunaan pendekatan kontingensi adalah untuk mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang memengaruhi kinerja dan kualitas laporan keuangan. Dengan menggunakan pendekatan kontingensi memungkinkan adanya variabel lain yang bertindak sebagai variabel *moderating* atau variabel *intervening*.

Beberapa penelitian akuntansi menggunakan pendekatan kontinjensi untuk mempelajari hubungan antara variabel konstekstual seperti ketidakpastian lingkungan (Otley, 1980). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian intern (SPI) , komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian ini teori kontingensi dijelaskan dengan menggunakan salah satu variabel yang terdapat pada teori kontigensi yaitu dengan menggunakan variabel moderasi. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memungkinkan dapat memperkuat dan memperlemah pengaruh penerapan SAP, kompetensi SDM, SPI, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.1.3. Kualitas laporan keuangan

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang

signifikan tentang kondisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor selama satu periode tersebut. Laporan keuangan digunakan terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, menilai kondisi ekonomi dan keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memiliki karakteristik kualitatif. Berdasarkan *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2* berisi tentang karakteristik-karakteristik kualitatif informasi keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan berguna dalam meyakinkan bahwa informasi keuangan adalah bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi (FASB 1980). Diperlukan atribut atau kualitas bahwa informasi keuangan seharusnya memiliki karakteristik kualitatif utama yaitu relevan dan reliabel. Materialitas terkait dalam kualitas relevan. Karakteristik kedua mencakup komparabilitas, konsistensi dan ketepatan-waktuan.

Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*) dan nilai prediktif (*predictive-value*). Dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*) dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*).

Menurut PP 71 Tahun 2010 sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah wajib menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Adapun karakteristik yang menjadi persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat mencapai kualitas yang diinginkan, antara lain:

1. Relevan, terhadap keperluan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan;
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas, menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya, netral, yaitu tidak memihak, dapat diverifikasi, masuk akal dan mencakup semua fakta yang relevan.
3. Dapat dibandingkan, dalam arti informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, atau dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Faktor – faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dilihat dari berbagai faktor yang dijadikan sebagai variabel dalam penelitian. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan berbagai variabel antara lain (Nirwana & Haliah, 2018) melakukan penelitian dengan menggunakan 4 (empat) variabel yaitu faktor personal/kompetensi pribadi, faktor sistem/administrasi (regulasi), faktor politik dan kualitas informasi laporan keuangan, selanjutnya (Qomah & Ismunawan, 2021) meneliti 4 (empat) variabel yaitu penerapan SAP,

sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. (Agung & Gayatri, 2018) melakukan penelitian dengan menggunakan 5 (lima) variabel yaitu gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi. (Evicahyani & Setiawina, 2016) dengan menggunakan 4 (empat) yaitu kompetensi sumber daya manusia (SDM), penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), (Setyowati et al., 2016) dengan menggunakan 3 (tiga) variable yaitu peran teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit.

2.1.4. Penerapan standar akuntansi pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman dan prinsip yang memandu perlakuan akuntansi saat menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrua, yaitu SAP yang melaporkan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam pelaporan pengelolaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Suatu basis akuntansi dimana transaksi keuangan dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan saat transaksi terjadi, tanpa memperhatikan waktu terjadinya kas atau setara kas diterima atau dibayar, disebut dengan akuntansi berbasis akrua. Dalam akuntansi berbasis akrua,

waktu pencatatan disesuaikan dengan waktu terjadinya arus sumber daya, sehingga informasi dapat diberikan selengkap mungkin, karena semua arus sumber daya dicatat. Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh *IFAC Public Sector Committee* dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2014 menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian target/tujuan.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari implementasi SAP berbasis akrual diharapkan dapat memberikan manfaat lebih baik kepada para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun auditor laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi dimana biaya yang dikeluarkan sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia.

2.1.5. Kompetensi sumber daya manusia

Kompetensi adalah sifat dan keterampilan profesional yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tugas dan/atau fungsi jabatan. Kompetensi sumber daya manusia memainkan peran yang sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan unit masing-masing (Wati *et al.*, 2014). Penelitian (Pujanira & Taman, 2017) mengatakan Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan

pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Secara umum, kompetensi sumber daya manusia dapat di artikan tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang guna melakukan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi keterampilan dan pengetahuannya maka semakin tinggi juga kualitas kompetensi sumber daya manusianya.

(Rizka *et al.*, 2021) mengatakan bahwa Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut yaitu berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, indikator yang digunakan dalam variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pegawai) adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Pengetahuan biasanya didapat dari berbagai pengalaman yang dialami seseorang. Karyawan yang berkompeten tinggi sangat membantu pencapaian tujuan dan menentukan keberhasilan penyelesaian tugas yang diberikan.
2. Keterampilan, yaitu kemampuan seseorang untuk mampu menggunakan ide dan pengetahuannya untuk melakukan dan menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Sikap, yaitu reaksi terhadap tugas yang diberikan. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diberikan dengan resikonya merupakan sikap karyawan yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam penelitiannya (Puspita *et al.*, 2020) menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan

Keuangan. Hal Ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi kinerja setiap pegawai dalam perusahaan maupun sebuah instansi. Setiap karyawan harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan khusus dan sikap yang baik untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

2.1.6. Sistem pengendalian internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjamin keamanan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, melindungi aset negara, dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah secara menyeluruh.

Unsur SPIP mengacu pada konsep Sistem Pengendalian Intern yang dikemukakan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Pengendalian intern diperlukan untuk dengan mudah menemukan atau menganalisis masalah yang ada atau masalah yang mungkin timbul terkait dengan pencapaian tujuan sehingga sehingga kita mengetahui dengan jelas tentang pencapaian target. Kejadian paling umum dalam meningkatkan efisiensi pemerintah adalah korupsi, kesalahan administrasi dan pengelolaan keuangan yang buruk (Triyanti, 2017). Proses pengendalian diintegrasikan ke dalam

tindakan dan aktivitas yang senantiasa dilakukan oleh manajemen dan seluruh karyawan. Oleh karena itu dasar dari pengendalian ini adalah orang-orang (SDM) organisasi, yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik untuk mencapai tujuan dari instansi pemerintah.

2.1.7. Komitmen organisasi

Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan hati, bekerja keras, berkorban dan bertanggung jawab demi mencapai tujuan dirinya dan tujuan perusahaan yang telah disepakati atau ditentukan sebelumnya. Komitmen memegang peranan penting, terutama dalam prestasi kerja seseorang, yang melalui komitmen menjadi acuan dan dorongan yang menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab atas tugasnya. Komitmen organisasi didasarkan pada kepercayaan karyawan terhadap nilai-nilai organisasi, kemauan karyawan untuk membantu mencapai tujuan organisasi, dan kesetiaan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Ketika karyawan merasa jiwanya terhubung dengan nilai-nilai organisasi yang ada, mereka akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mereka memiliki tanggung jawab dan kesadaran mengelola organisasi dan akan termotivasi untuk melaporkan semua kegiatan (Yusrianti *et al.*, 2021).

Menurut (Allen & Meyer, 1990) komitmen organisasi sebagai keinginan karyawan untuk tetap bekerja dengan organisasi mereka. Komitmen organisasi melibatkan tiga sikap, yaitu identifikasi dengan tujuan organisasi, rasa memiliki terhadap misi organisasi dan loyalitas terhadap organisasi.

Mowday *et al.*, (1982:186) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai: *the relative strength of an individual's identification with and involvement in a particular organization*. Definisi menunjukkan bahwa komitmen organisasi memiliki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan

keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasinya

Sedangkan Sopiah (2011) mendefinisikan komitmen organisasional dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan perusahaan dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan perusahaan tersebut. Komitmen artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai perusahaan dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan perusahaan demi pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi tersebut, komitmen mencakup unsur kesetiaan terhadap organisasi, partisipasi dalam pekerjaan dan pengakuan terhadap nilai dan tujuan organisasi. Komitmen yang rendah mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menunaikan tugasnya

(Allen & Meyer, 1990) menjelaskan ada tiga aspek komitmen antara lain: 1) *Affective commitment*, yang berhubungan dengan keinginan untuk terikat pada organisasi. Individu bertahan dengan perusahaan karena keinginan mereka sendiri. Kunci dari komitmen ini adalah keinginan (*want to*); 2) *Continuance commitment*, adalah suatu komitmen berdasarkan kebutuhan yang wajar. Dengan kata lain, komitmen ini dibentuk atas dasar untung dan rugi, dengan mempertimbangkan apa yang harus dikorbankan jika ingin tetap bersama perusahaan. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup (*need to*); 3) *Normative Commitment*, adalah komitmen yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam diri karyawan, termasuk keyakinan individu tentang tanggung jawab terhadap perusahaan. Ia merasa harus menjaga loyalitas. Kunci dari komitmen ini adalah harus bertahan dalam organisasi (*ought to*).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasional yang tinggi dapat memengaruhi loyalitas karyawan terhadap

perusahaan atau organisasi. Karyawan akan memberikan kesetiaan, bersemangat, siap bekerja keras, berkorban, dan peduli terhadap kelangsungan hidup organisasi.

2.1.8. Gaya kepemimpinan

Gaya kepemimpinan (*style of leadership*) adalah cara seorang pemimpin menjalankan peran kepemimpinannya atau menjalankan fungsi managemennya dalam memimpin bawahan (Mattayang, 2019). Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan dan tindakan memengaruhi seseorang melalui komunikasi untuk menimbulkan inspirasi dan semangat dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu, biasanya tujuan organisasi/kelompok (Basalamah, 2020).

Gaya kepemimpinan juga merupakan standar perilaku yang diadopsi seseorang ketika mereka memiliki kekuatan dan kelemahan. Seorang pemimpin yang mampu menggunakan gaya kepemimpinan dengan tepat, maka mampu menggunakan untuk membina, menggerakkan, dan mengarahkan semua potensi bawahan dilingkungannya (Aisah, 2020).

Pemimpin merupakan pemeran utama yang akan menentukan arah keberhasilan dari suatu organisasi. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku anggotanya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga berpengaruh pula pada hasil kerja anggota organisasinya. Semakin baik cara memimpin seorang pimpinan dimana karyawan tersebut bekerja, maka akan semakin memengaruhi kinerja dari karyawan tersebut (Agung & Gayatri, 2018).

Gaya Kepemimpinan *Path Goal Theory* dikembangkan oleh (House, 1996) menyatakan tugas dari pemimpin untuk membantu para pengikut dalam memperoleh tujuan mereka dan untuk menyediakan pengarahan atau dukungan

untuk memastikan bahwa tujuan mereka konsisten dengan keseluruhan tujuan organisasi. Dalam teori ini (House, 1996) menggabungkan empat tipe atau gaya kepemimpinan yang utama, yaitu :

1. Kepemimpinan direktif. Pemimpin memberi tahu anggota tentang apa yang diharapkan dari mereka, dan memberi tahu apa yang harus mereka lakukan, serta menekankan kepatuhan terhadap aturan dalam organisasi.
2. Kepemimpinan suportif. Gaya kepemimpinan yang membuat pekerjaan terasa menyenangkan bagi bawahan. Pemimpin ramah, mudah didekati, dan menunjukkan perhatian tulus pada bawahan.
3. Kepemimpinan partisipatif. Pemimpin meminta dan menggunakan saran dari bawahan, tetapi tetap membuat keputusan.
4. Kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Pemimpin menetapkan tujuan yang menantang bawahan untuk menunjukkan keyakinan mereka bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka dan bekerja yang lebih baik.

2.1.9. Pemanfaatan teknologi informasi

Menurut *Information Technology Assosiation of America* (ITAA), teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi Informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman (Wulan *et al.*, 2020). Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mengumpulkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data

dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan ringkas. (Qomah dan Ismunawan, 2021).

Saat ini pemanfaatan teknologi tidak dapat dihindari, karena kebutuhan akan informasi yang sangat cepat dan akurat merupakan kebutuhan yang penting dalam segala hal. Salah satu teknologi yang paling maju adalah teknologi berbasis web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini telah digunakan dibanyak bidang termasuk bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dll. Teknologi internet yang sudah mengakar saat ini harus dimanfaatkan secara optimal, keberadaan teknologi tersebut juga diharapkan dapat menjadi jawaban atas pemerataan kecepatan pelayanan, sebuah langkah maju ketika pemerintah mulai mengadopsi teknologi ini tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik (Akhmad *et al.*, 2018).

Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terintegrasi sehingga memudahkan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi akan memberikan dampak positif karena memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, biaya dan sedikit kemungkinan kesalahan sehingga akan memperoleh laporan keuangan yang kualitas (Wulan *et al.*, 2020). (Arumsari *et al.*, 2022) mengungkapkan Teknologi informasi yakni meliputi teknologi komputer (*computing technology*) dan teknologi komunikasi (*communication technology*) yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi baik itu yang bersifat finansial atau non finansial (Hakim, 2012). (Faisal, 2020) mendefinisikan pemanfaatan teknologi sebagai manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya dimana pengukurannya berdasarkan pada intensitas

pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Menurut (Sholeh, 2017) pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur dengan indikator : Perangkat, merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan, dua Pengelolaan Data Keuangan, merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh, tiga Perawatan, merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara berkala terhadap perangkat teknologi informasi untuk mendukung kelancaran pekerjaan operasional.

2.2. Telaah Riset Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan (Agung & Gayatri, 2018) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

(Nirwana & Haliah, 2018) Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah dengan menambahkan faktor-faktor kontekstual, seperti faktor pribadi, faktor system/administrasi dan faktor politik, yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan informasi dan kinerja

pemerintah. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi kualitas laporan keuangan, kinerja pemerintah, kompetensi, regulasi atau peraturan, dan faktor politik. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah yang laporan keuangannya telah diaudit oleh BPK, pemerintah daerah yang laporan akuntabilitas keuangannya telah dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data partial least square (PLS Model). Hasil berdasarkan penelitian (Nirwana & Haliah, 2018) menunjukkan bahwa kompetensi faktor personal, faktor politik dan faktor sistem atau administrasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi faktor pribadi, faktor politik dan regulasi faktor sistem atau administrasi tidak memiliki efek langsung pada kinerja. Namun, ada pengaruh tidak langsung yang signifikan antara kompetensi faktor pribadi terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan yang berarti bahwa kompetensi faktor pribadi yang lebih tinggi akan mengarah pada kinerja yang lebih tinggi melalui kualitas laporan keuangan. Dan kualitas laporan keuangan memengaruhi kinerja. Laporan keuangan yang tinggi akan memengaruhi kinerja.

(Sorusai, 2019) tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ende. Unit analisis terdiri dari pengelola keuangan dan 114 orang dari 35 organisasi perangkat daerah (OPD). Metode analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Ende. Namun, komitmen organisasi tidak memperkuat hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Ende.

(Rahmawati et al., 2018) meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

(Evicahyani & Setiawina, 2016) Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan variabel intervening Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan menggunakan metode analisis *Partial Least Square (PLS) Structural Equation Modeling (SEM)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi SDM, Penerapan SAP, Pemanfaatan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Tabanan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel intervening, yaitu Penerapan SPIP.

(Harlinda, 2016) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sumberdaya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi,

komitmen organisasi, pemahaman akuntansi, faktor eksternal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, pemahaman akuntansi, dan faktor eksternal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah, sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian internal akuntansi, komitmen organisasi, pemahaman akuntansi dan faktor eksternal secara bersama-sama memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

(Pangalinan, 2020) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, pengaruh independensi audit internal, pengaruh komitmen organisasi, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD Kabupaten Toraja Utara. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dokumentasi dan literature, dimana data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan sistem pengendalian intern meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebaliknya melemahnya sistem pengendalian intern mengurangi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, perbaikan kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah demikian pula sebaliknya penurunan kompetensi sumber daya manusia akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan independensi audit internal meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah demikian pula sebaliknya penurunan independensi

audit internal, menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, perbaikan komitmen organisasi meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya, penurunan komitmen organisasi menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

(Yusrianti et al., 2021) penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara Penerapan SAP Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern terhadap Kualitas laporan Keuangan, Penerapan SAP Berbasis Akrua terhadap Kualitas laporan Keuangan dengan moderasi Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas laporan Keuangan dengan moderasi Komitmen Organisasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas laporan Keuangan dengan moderasi Komitmen Organisasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam upaya menjawab masalah dan mencapai tujuan penelitian ini adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Moderated Regression Analysis (MRA.) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan SAP Berbasis Akrua, Kompetensi SDM, Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Komitmen organisasi memoderasi semu (*quasi moderator*) meningkatkan pengaruh implementasi SAP berbasis akrua terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten Jayapura, Komitmen Organisasi dimoderasi murni (*pure moderator*) dengan memperkuat pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Komitmen Organisasi memoderasi murni (*Pure Moderator*) dengan memperkuat pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Penelitian yang dilakukan (Marisa *et al.*, 2020) bertujuan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM), penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), pemanfaatan teknologi informasi masing-masing berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Lampung dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), pemanfaatan teknologi Informasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan badan layanan umum (BLU) di Provinsi Lampung.

(Rizka *et al.*, 2021) tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel yang memengaruhi (*intervening*) keberhasilan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan keberhasilan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel *intervening* melalui keberhasilan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.